



**ANALISIS *FRAMING* PERINGATAN DARURAT PADA AKUN  
INTAGRAM NARASI.TV**

**Moch. Rosy Ilhamsyah**

Dosen Komunikasi Penyiaran Islam Institut Al-Fithrah Surabaya

[rosyilhamsyah@alfithrah.ac.id](mailto:rosyilhamsyah@alfithrah.ac.id)

**Abstrak**

Tulisan ini dilakukan untuk mengkaji atau menganalisis Apa makna postingan peringatan Peringatan Darurat dalam akun instagram narasi.tv dengan menggunakan metode analisis framing model William A. Gamson dan Andre Modigliani, Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis analisis teks media. Metode analisis yang digunakan ialah analisis framing model William A. Gamson dan Modigliani. Model ini menggunakan, teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan observasi secara mendalam oleh peneliti untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan literasi yang sesuai konteks. Adapun hasilnya bahwa konstruksi peringatan darurat demokrasi di Indonesia ditandai warna Biru yang bertulis Peringatan Darurat sebab putusan MK langsung direspons DPR dengan membuat UU yang dikerjakan pada satu hari saja, mustahil ada naskah akademiknya, tidak mungkin ada sosialisasi rancangan dulu apalagi mendengarkan aspirasi dan partisipasi rakyat.

**Kata Kunci:** Analisis Framing, Komunikasi Politik, Media Sosial

**Abstract**

*This article was carried out to examine or analyze what the meaning of Emergency Warning warning posts on the Narrative.tv Instagram account is by using the framing analysis method modeled by William A. Gamson and Andre Modigliani. The method used in this research is a descriptive qualitative approach with a type of media text analysis. The analytical method used is the framing analysis model of William A. Gamson and Modigliani. This model uses data collection techniques in the form of documentation and in-depth observation by researchers to obtain maximum results with literacy that is appropriate to the context. The result is that the construction of an emergency warning for democracy in Indonesia is marked in blue with the words Emergency Warning because the Constitutional Court's decision was immediately responded to by the DPR by making a law which was carried out in one day, it was impossible to have an academic text, it was impossible to socialize the draft first, let alone listen to the aspirations and participation of the people.*

**Keyword:** Framing Analysis, Political Communication, Social Media

## PENDAHULUAN

Dewasa ini media teknologi informasi yang semakin modern dan pesat, membuat teknologi memiliki peran penting dalam perilaku masyarakat. Saat ini sistem informasi telah menjadi suatu kebutuhan dalam berbagai kegiatan atau aktivitas. Pemanfaatan teknologi yang baik dan juga tepat, berdampak kepada memperoleh informasi yang akurat (Putri & Qurniawati, 2024). Media teknologi informasi yang sering digunakan ialah media sosial, dimana media sosial merupakan media digunakan merepresentasikan diri, melakukan kolaborasi, berbagi komunikasi, menekankan pada eksistensi virtual dan menjalin hubungan sosial berbagai individu. Saat ini beragam aplikasi media sosial yang muncul dan hadir, dimana media sosial tersebut hadir dengan berbagai kemudahan untuk penggunanya. Salah satu media sosial yang banyak digunakan saat ini adalah Instagram. Berdasarkan Datareportal bulan Januari 2024 bahwa Indonesia masuk urutan ke-4 dunia sebagai pengguna instagram melaporkan bahwa pengguna internet saat ini sebesar 5.35 M atau setara dengan 66.2% dari jumlah populasi dunia sebesar 8.08 M. Sedangkan pengguna media sosial sebesar 5.04 M setara dengan 62.3% dari populasi dunia.

Maka tidak heran ketika media sosial pada akun instagram kolaborasi narasi.tv, najwashihab, matanajwa dan narasinewsroom yang mengawali postingan memberikan peringatan darurat dengan membagikan gambar simbol garuda biru berlatar belakang biru, disertai tulisan “Peringatan Darurat” di bagian atas. Gambar tersebut dibagikan ulang juga oleh selebgram dan *influencer*. Jadilah trending topik di berbagai media sosial baik di X maupun Instagram. Sejak trending topik tersebut, ramai diperbincangkan di media sosial, khususnya di Instagram, terlebih pada akun Instagram narasi.tv intens menyoroti fenomena Peringatan Darurat serta mengikuti perkembangan berbagai aksi berbagai demo pada tanggal 22 Agustus 2024.

Peringatan darurat di Indonesia, terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang merujuk pada keadaan di mana negara menghadapi situasi kritis yang memerlukan tindakan cepat dan efektif. Peringatan Darurat (*State of Emergency*) merupakan keadaan yang memungkinkan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah khusus dalam menghadapi krisis yang mengancam keamanan, ketertiban, atau stabilitas negara. Ini termasuk pengetatan hukum, pembatasan hak-hak tertentu, dan penguatan kontrol pemerintah. Konstitusi dan Peringatan Darurat Dalam konstitusi Indonesia, peringatan darurat diatur dalam Pasal 22 UUD 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan wewenang kepada Presiden untuk menetapkan keadaan darurat apabila negara menghadapi ancaman yang sangat mendesak. Namun, keputusan ini harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam jangka waktu tertentu.

Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk menilai dan memastikan bahwa tindakan pemerintah, termasuk yang terkait dengan peringatan darurat, sesuai dengan konstitusi. MK memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang atau peraturan pemerintah terhadap konstitusi. Jika ada gugatan atau sengketa hukum terkait dengan penerapan peringatan darurat atau kebijakan yang diambil selama keadaan darurat, MK akan memutuskan apakah kebijakan tersebut konstitusional atau tidak. Contoh beberapa kasus di mana MK terlibat dalam peringatan darurat bisa melibatkan pengujian konstitusionalitas undang-undang yang mengatur keadaan darurat, atau penilaian terhadap tindakan pemerintah yang diambil

selama periode darurat. Misalnya, MK mungkin diminta untuk menilai apakah langkah-langkah yang diambil selama pandemi COVID-19 atau bencana alam sesuai dengan ketentuan konstitusi. Tujuan dari peringatan darurat adalah untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Namun, tindakan yang diambil selama keadaan darurat harus tetap memperhatikan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi. Putusan MK dalam konteks peringatan darurat sangat penting untuk memastikan bahwa tindakan pemerintah tidak melanggar konstitusi dan hak-hak dasar warga negara.

Dari hal ini, dapat terlihat bagaimana akun narasi.tv menstimulus netizen merepost visual Garuda berlatar belakang hingga treng berbagai macam media sosial, hal ini bisa diketahui dengan menganalisis menggunakan analisis Framing, yang dimana penelitian ini lebih memfokuskan kepada analisis framing model Gamson dan Modigliani. Analisis Framing yang digunakan bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis framing pada akun Instagram narasi.tv.

## METODE PENELITIAN

Metode pada jurnal ini menggunakan metode analisis framing. Analisis framing bagian terbaru dari pendekatan analisis wacana, khususnya guna menganalisa teks media. (Sobur, 2015) *Frame* dimaknai sebagai struktur konseptual yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan, dan wacana, serta yang menyediakan kategori-kategori standar guna mengapresiasi realitas. Konsep ini dilanjutkan oleh Goffman pada tahun 1974, yang menganalogi sebagai kepingan-kepingan perilaku (*strips of behavior*) yang membimbing personal dalam membaca realitas.

Framing ialah sebuah prinsip dimana pengalaman dan realitas yang kompleks diorganisasi secara subyektif. Kemudian framing itu, khalayak melihat realitas dengan pandangan tertentu dan melihat sesuatu yang bermakna dan beraturan. (Kartini et al., 2020) Framing media mengorganisasikan realitas kehidupan sehari-hari yang akan ditransformasikan kedalam sebuah cerita. Analisis framing, menganalisa berbagai cara individu mengorganisasikan pengalamannya sehingga memungkinkan seseorang mengidentifikasi dan memahami beragam peristiwa, memaknai aktivitas kehidupan yang sedang berjalan. Pengaplikasiannya, framing merupakan titik batas yang diangkat oleh media sosial atas suatu isu atau peristiwa, berawal isu tersebut diambilnya satu sisi atau aspek tertentu untuk ditonjolkan kepada netizen yang menggunakan berbagai strategi wacana. (Taregan & Haniza, 2021)

Hal yang penting dalam mengemas berita atau framing, Maka berita itu harus dikonstruksi sedemikian rupa dibentuk dengan efektif, agar konstruksi pesan itu dimaknai oleh khalayak. El-nawawy dan Elmasry menjelaskan “*some of the framing differences can be attributed to the different nature of the events*” (beberapa perbedaan pembingkai dapat dikaitkan dengan perbedaan peristiwa yang sebenarnya). (Febriana et al., 2020). Model framing pada penelitian ini menggunakan model Gamson dan Modigliani didasarkan dalam pendekatan konstruksionis yang melihat representasi media-berita dan artikel, yang terdiri atas *package interpretatif* yang mengandung konstruksi makna tertentu. Pada *package* ini memiliki dua struktur yaitu *core frame* dan *condensing symbol*. Struktur pertama merupakan pusat organisasi elemen ide yang membantu komunikator guna menunjukkan substansi isu

yang tengah dibahas. Sedangkan struktur kedua mempunyai dua substruktur yakni *framing device* dan *reasoning device* (Sobur, 2015).

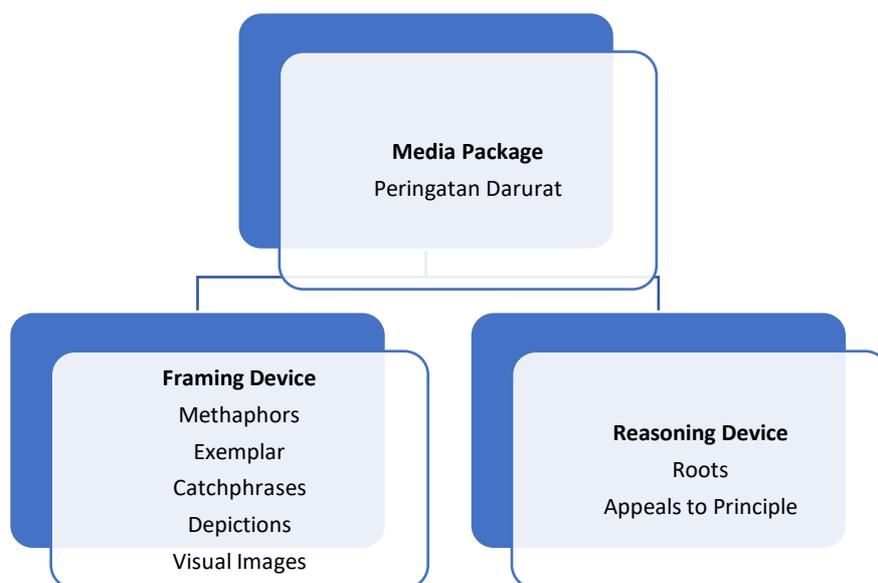
*Core frame* (gagasan sentral) tentang elemen-elemen inti guna menjelaskan pengertian yang relevan terhadap peristiwa, dan mengarah pada makna isu yang dibangun *condensing symbol* (simbol yang “dimampatkan”). Menjelaskan ide sentral ini, akan didukung oleh perangkat wacana lain sehingga antara satu bagian wacana dan bagian lain saling kohesif (saling mendukung).

Struktur kedua, *condensing symbol* terdiri dari *framing device* (perangkat framing) yang mencakup *metaphor* (metafora), *exemplar* (ilustrasi), *catchphrases* (kontras), *depictions* (label), dan *visual images* (gambar visual) yang menekankan aspek bagaimana “melihat” suatu isu. *Metaphor* dipahami sebagai cara memindah makna dengan merelasikan dua fakta melalui analogi, atau memakai kiasan dengan menggunakan kata seperti, ibarat, bak, sebagai, umpama, laksana. John Fiske menilai metafora sebagai *common sense*, pengalaman hidup keseharian yang di *taken for granted* masyarakat. *Common sense* terlihat alamiah atau kenyataan diproduksi secara arbitrer dan perlahan-lahan menjadi kekuatan ideologis kelas dominan dalam memperluas dan mempertahankan ide untuk seluruh kelas.

*Exemplar* mengemas fakta tertentu secara mendalam guna satu sisi memiliki nilai makna lebih untuk dijadikan rujukan/pelajaran. *Catchphrases*, istilah bentukan kata, atau frase mencerminkan fakta yang merujuk pemikiran atau semangat tertentu. *Depictions*, penggambaran fakta dengan memakai kata, istilah, kalimat konotatif agar khalayak terarah ke citra tertentu. *Visual images*, pemakaian gambar atau foto, diagram, grafis, tabel, kartun, dan sejenisnya, untuk mengekspresikan kesan, misalnya, perhatian atau penolakan, dibesarkan-dikecilkan, ditebalkan atau dimiringkan, serta pemakaian warna. Kartun dimaksud ialah gambar lucu yang mendeskripsikan kejadian-kejadian (biasanya politik) mutakhir dari suatu pemerintahan atau perilaku kaum elit negara. (Febriana et al., 2020)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

HPeneliti menggunakan analisis *framing* model William A. Gamson dan Andre Modigliani guna menemukan pembingkai peringatan darurat dalam postingan Instagram pada akun narasi.tv yang merupakan bagian inti pemberitaan dari proses dimana makna diproduksi dan dipertukarkan diantara para anggota dari sebuah budaya. Model *framing* ini melibatkan penggunaan *metaphors*, *exemplars*, *catchphrases*, *depictions*, dan *visual images*. (Sobur, 2015)



Bagan 1.0

Analisis *framing* model William  
A.Gamson dan Andre Modigliani

**Media Package** yang dibentuk oleh Narasi.tv ialah **Framing Device** diantaranya **metaphors** simbol negara Indonesia ialah garuda Pancasila dan Lembaga negara Indonesia yakni legislatif, eksekutif, yudikatif. **Exemplar** Lembaga yudikatif ialah salah satu cabang kekuasaan pada sistem pemerintahan yang berfungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan. Di berbagai negara, lembaga ini dikenal sebagai badan peradilan atau pengadilan. Fungsi utama lembaga yudikatif yang pertama menafsirkan hukum, mengartikan dan menjelaskan undang-undang serta peraturan yang ada. Kedua, menilai kasus : Memutuskan kasus yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa berdasarkan hukum yang berlaku. Ketiga, Menjaga Konstitusi : Memastikan bahwa semua undang-undang dan tindakan pemerintah sesuai dengan konstitusi negara. Keempat, Menyelesaikan Sengketa: Menyelesaikan perselisihan antara individu, antara individu dan pemerintah, atau antara lembaga-lembaga pemerintah. **Catchphrases** ilmu tentang ketatanegaraan semakin bertambah, tentang demokrasi Indonesia. **Depictions** selalu mengingatkan bahwa Masyarakat wajib menjaga demokrasi yang berkeadilan di Indonesia. **Visual Images** (gambar 1.0)



Selanjutnya, *Reasoning Device* yang terdiri *roots* Simbol negara Indonesia ialah Garuda Pancasila. Garuda adalah burung mitos dalam budaya Indonesia yang melambangkan kekuatan dan keberanian.(Setiawan, 2017) Dalam konteks negara, Garuda Pancasila melambangkan negara Indonesia dengan simbol-simbol yang memiliki makna mendalam. Berikut adalah elemen-elemen utama dari Garuda Pancasila dan artinya: Garuda: Burung mitos yang merupakan simbol kekuatan dan keperkasaan. Dalam mitologi Hindu-Buddha, Garuda adalah kendaraan Dewa Wisnu dan sering digambarkan sebagai burung dengan tubuh manusia dan kepala burung. Perisai: Dikenakan oleh Garuda di dadanya. Perisai ini terdiri dari lima bagian yang melambangkan Pancasila, dasar negara Indonesia. Setiap bagian perisai memiliki simbol dan arti tersendiri: Bintang: Melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rantai: Melambangkan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Pohon Beringin: Melambangkan Persatuan Indonesia.(Sjahdeni, n.d.) Kapak Bersilangan dan Padi serta Kapas: Melambangkan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan. Pita Merah Putih: Berisi semboyan "Bhinneka Tunggal Ika", yang berarti "Berbeda-beda tetapi tetap satu".Cengkeraman Garuda: Memegang pita yang bertuliskan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika". Warna dan Bentuk: Garuda Pancasila umumnya digambarkan dengan warna emas, melambangkan kemegahan dan kebesaran. Bentuknya simetris dan kokoh, mencerminkan kestabilan dan

kekuatan negara. Simbol ini mencerminkan nilai-nilai dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, dan menunjukkan komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip tersebut.

Warna biru dongker, juga dikenal sebagai biru navy atau biru gelap, memiliki berbagai makna dan konotasi dalam berbagai konteks. Berikut adalah beberapa makna umum dari warna biru dongker: Kedalaman dan Ketenangan: Biru dongker sering dikaitkan dengan kedalaman laut dan langit malam, yang melambangkan ketenangan, kedamaian, dan stabilitas. Kepercayaan dan Profesionalisme: Warna ini sering digunakan dalam konteks profesional dan bisnis karena memberi kesan kepercayaan, integritas, dan keseriusan. (Monica & Luzar, 2011) Banyak seragam dan logo perusahaan menggunakan biru dongker untuk menciptakan citra profesional. Kekuatan dan Kewibawaan: Biru dongker juga dapat melambangkan kekuatan, otoritas, dan kewibawaan. Dalam banyak budaya, warna ini dianggap kuat dan penuh rasa hormat. Keseriusan dan Formalitas: Dalam pakaian formal, seperti jas dan seragam militer, biru dongker sering digunakan untuk memberikan kesan serius dan terhormat. Tradisi dan Warisan: Dalam beberapa budaya, biru dongker memiliki konotasi historis dan tradisional. Misalnya, dalam bendera nasional dan lambang negara, biru dongker bisa melambangkan aspek warisan dan sejarah. Secara keseluruhan, biru dongker adalah warna yang memberi kesan stabilitas, profesionalisme, dan kedalaman, dan sering digunakan untuk menyampaikan pesan yang serius dan penuh rasa hormat.

Selanjutnya, *Appeals to Principle* pertama, di Indonesia, lembaga yudikatif terdiri dari beberapa institusi utama: Mahkamah Agung (MA) sebagai Pengadilan tertinggi yang menangani kasus-kasus kasasi dan memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengontrol pengadilan-pengadilan di bawahnya. Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai Mengawasi konstitusionalitas undang-undang dan menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum serta pengujian undang-undang terhadap konstitusi. Pengadilan Negeri berfungsi mengadili perkara-perkara tingkat pertama yang melibatkan pidana dan perdata. Selanjutnya Pengadilan Tinggi berfungsi Mengadili perkara yang diajukan dari pengadilan negeri di wilayahnya dan melakukan pemeriksaan kembali terhadap putusan pengadilan negeri. Pengadilan Agama bertugas Mengadili perkara-perkara terkait dengan hukum agama, seperti perceraian dan waris untuk umat Islam. Terakhir, Pengadilan Militer bertugas Mengadili perkara yang melibatkan anggota angkatan bersenjata. Lembaga yudikatif berperan penting dalam menjaga supremasi hukum dan melindungi hak-hak asasi manusia, serta memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan konsisten. Kedua, Polemik putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Pilkada yakni Putusan Mahkamah Konstitusi mengubah syarat partai politik yang mengikuti pemilu dan revisi Undang-Undang Pilkada yang dianggap kontroversial. Ketiga Pembatasan kebebasan berekspresi dan Tindakan represif terhadap aktivis dan pengkritik pemerintah. Keempat, Pada tanggal 20 Agustus 2024 Mahkamah Konstitusi memutuskan mengubah syarat ambang batas pencalonan kepala daerah, partai atau gabungan politik tidak lagi harus mengumpulkan minimal 20% kursi di DPRD atau 25% suara sah untuk mencalonkan kepala daerah dan wakil kepala daerah. MK juga memutuskan calon kepala daerah Tingkat provinsi atau calon gubernur berusia 30 tahun saat ditetapkan oleh KPU sebagai kandidat resmi. (Attar, 2024) Kelima, DPR memutuskan ambang batas partai untuk mencalonkan pasangan dikembalikan ke

aturan lama, sedangkan usia kandidat diputuskan mengikuti Keputusan mahkamah agung yakni 30 tahun saat dilantik. (Attar, 2024)

## SIMPULAN

Perangkat framing model Gamson dan Modigliani tentang postingan peringatan darurat oleh akun instagram Narasi.tv, memuat konstruksi peringatan darurat demokrasi di Indonesia ditandai warna Biru yang bertulis Peringatan Darurat sebab putusan MK langsung direspons DPR dengan membuat UU yang dikerjakan pada satu hari saja, mustahil ada naskah akademiknya, tidak mungkin ada sosialisasi rancangan dulu apalagi mendengarkan aspirasi dan partisipasi rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Attar, H. (2024, August 20). *Ini Putusan MK Soal Ambang Batas Pencalonan Pilkada 2024*. Jakarta.Nu.Pr.Id.
- Febriana, R. P., Sukarelawati, & Fitriah, M. (2020). FRAMING DEVICE IN GAMSON AND MODIGLIANI MODEL ABOUT THE NEWS OF KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI. *Jurnal Komunikatio*, 6.
- Kartini, Hasibuan, R. M., Sinaga, N. S., & Rahmadina, A. (2020). Metode Analisis Framing dalam Media Sosial. *Edukasi Nonformal*, 3.
- Monica, & Luzar, L. C. (2011). EFEK WARNA DALAM DUNIA DESAIN DAN PERIKLANAN. *Humaniora*.
- Putri, I. M., & Qurniawati, E. F. (2024). ANALISIS FRAMINGPEMBERITAAN PENUTUPAN TIKTOK SHOPPADA PORTAL BERITA CNNINDONESIA.COM DAN REPUBLIKA.CO.ID. *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Sosial Dan Informasi*, 9 nomor 4.
- Setiawan, K. (2017). *Fakta Unik Lambang Negara di Dunia*. PT Elex Media Komputindo.
- Sjahdeni, S. R. (n.d.). *SEJARAH HUKUM INDONESIA*. Kencana.
- Sobur, A. (2015). *Analisis Teks Media*. PT Remaja Rosdakarya.
- Taregan, P. G., & Haniza, N. (2021). ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN MEDIA ONLINE SUARA.COM DAN BERITASATU.COMATASKASUSPERNYATAANTRIRISMAHARINITENTANG “MEMINDAHKAN PEGAWAI KE PAPUA.” *The Source Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3.